



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENERAPAN SISTEM INFORMASI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA BANGLAS BARAT KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

SKRIPSI

Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

AL MARIO

NIM : 11627103820

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1441 H/ 2020 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

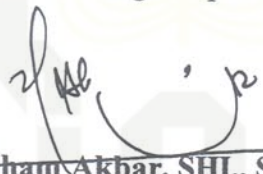
Skripsi dengan judul ***"Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti"*** yang ditulis oleh:

Nama : AL MARIO
 NIM : 11627103820
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Jumadil Akhir 1441 H
 10 Februari 2020 M

Pembimbing Skripsi


Hham Akbar, SHI., SH., MH.
 NIK. 130 217 040



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PENERAPAN SISTEM INFORMASI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA BANGLAS BARAT KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI"* yang ditulis oleh :

Nama : **AL MARIO**
 NIM : 11627103820
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 09 Maret 2020
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Maret 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr. H. Maghfiroh, MA

Sekretaris

Joni Alizon, SH., MH

Penguji I

Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Penguji II

H. Mhd. Kastulani, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State of Islam University of Sultan Syarif Kasim



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti”, Sistem Informasi Desa merupakan seperangkat alat meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia yang dikelola oleh Pemerintah Desa untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data desa yang diatur dalam bagian ketiga pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sistem Informasi Desa menurut Pasal 86 disebutkan bahwa desa berhak hak untuk mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, selain hak dari pemerintah desa bearti juga kewajiban dari pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten atau kota untuk mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang sesuai dengan amanat undang-undang tentang desa tersebut.

Dari latar belakang masalah tersebut timbul permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem informasi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, dan apa-apa saja faktor yang mempengaruhi dalam penerapan sistem informasi desa yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari wawancara yaitu kepada kepala dinas bagian komunikasi dan informasi, kepala bagian pemerintahan desa di dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, kepala desa Banglas Barat serta penyebaran angket kepada masyarakat. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, lokasi penelitian ini berada di desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa penerapan sistem informasi desa berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti tidak terlaksana dengan baik karena belum memenuhinya sarana prasarana untuk menerapkan sistem informasi desa ini. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya akses informasi desa yang di dapatkan oleh masyarakat.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi penerapan sistem informasi desa ini adalah sumber daya manusia yang belum memadai dalam hal pengelolaan atau pengoperasian sistem ini yang masih dalam masa pembinaan, regulasi penunjang yang kurang dari pemerintah daerah yaitu baik peraturan gubernur ataupun peraturan bupati, anggaran yang dibutuhkan untuk dapat terlaksana sistem informasi desa belum sesuai serta kurangnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem informasi desa, sehingga tidak terlaksananya penerapan sistem isformasi desa ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Agustar dan Ibunda Raizah yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak & ibu atas doa, restu dan ridho nya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Firdaus SH. MH dan Sekretaris Jurusan Bapak Muslim S.Ag, SH., M.Hum serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ilham Akbar SHI, SH, MH sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Firdaus SH, MH selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
8. Kepada Muhammad Sidik Muamar dan kiki Sebagai tim dalam pelaksanaan kegiatan usaha fotocopy Fajjar Meranti yang telah menjalankan bisnis ini dengan jujur dan semangat.
9. Kepada kawan-kawan kelas Ilmu Hukum D dan HTN A, serta kawan-kawan seangkatan 2016 yang telah berjuang bersama-sama belajar menjadi orang yang bermanfaat.
10. Kepada kak Ulan sebagai admin program studi Ilmu Hukum yang tak kenal lelah melayani administrasi dalam proses pembuatan skripsi, dan semoga lelahnya di hitung amal ibadah.
11. Kepada Riski Arasyat sebagai kawan begadang dalam membuat skripsi.
12. Kepada Hasnan Mukhlis, Syahrul Ramadhan, Adit, Roma Kurniawan, Nanda Kusuma, sebagai tim debat yang keren yang memberikan ilmu-ilmu baru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Kepada Amirhan SH., sebagai Duta Bahasa Riau dan juga Duta Uin Suska yang pertama dan terakhir sebagai teman diskusi hukum.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Maret 2020

AL MARIO
NIM.11627103820



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Banglas Barat	14
B. Legenda dan Lokakarya Desa Banglas Barat.....	15
C. Visi dan Misi Desa Banglas Barat	18
D. Prasarana dan Sarana Pendidikan dan Peribadatan	19
E. Mata Pencanharian Masyarakat Desa Banglas Barat.....	21
F. Organisasi Pemerintahan Desa Banglas Barat	22
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Sistem Informasi Desa	24
B. Kedudukan Informasi Bagi Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sistem Informasi Desa dalam Rangka Penerapan Otonomi Daerah	32
D. Penerapan Sistem Informasi Desa Merupakan Perwujudan dari Asas Pemerintahan yang Baik dan Layak.....	35
E. Peraturan Perundang-Undangan No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagai Aturan Sistem Informasi Desa.....	52
F. Kewenangan Pemerintah dalam Penerapan Sistem Informasi Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Banglas Barat Kecamatan Teing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti	64
B. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.....	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

		Halaman
Table I.1	Populasi dan Sampel.....	10
Table II.1	Prasarana Pendidikan	20
Table II.2	Prasarana Peribadatan.....	20
Table II. 3	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	21
Table IV.1	Tanggapan Masyarakat Tentang Sistem Informasi Desa	69
Table IV.2	Tanggapan Masyarakat Terhadap Apakah Pemerintah Desa Beserta Dinas Terkait Pernah Mensosialisasikan Tentang Sistem Informasi Desa	71
Table IV.3	Tanggapan Responden Tentang Apakah Masyarakat Pernah Menanyakan Tentang Sistem Informasi Desa di Desa Banglas Barat Kepada Perangkat Desa	71
Table IV.4	Tanggapan Responden Tentang Sumber Daya Manusia Menjadi Penghambat dalam Penerapan Program Sistem Informasi Desa di Desa Banglas Barat.....	74
Table IV.5	Tanggapan Responden Tentang Apakah Ada Kebutuhan dengan Adanya Sistem Informasi Desa di Desa Banglas Barat	78



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti ..	23





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika semangat otonomi daerah diiringi dengan adanya perkembangan berbagai desa-desa, hal ini akibat diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya diatur tentang desa. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengakui desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak asal-usul dan adat-istiadatnya. Oleh karena itu, desa bisa disebut dengan nama lain sesuai dengan kondisi sosial-budaya setempat.¹

Penguatan fungsi dan penyelenggaraan pemerintah daerah menurut otonomi dan tugas pembantuan diarahkan dan dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan

¹ H.A. Tabrani Rusyan, *Membangun Desa Berprestasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h.13.

² Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group), Cetakan ke-2, 2015, h. 96-97.



kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat; hal ini sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menempatkan desa di bawah kabupaten/kota. Penempatan desa di bawah kabupaten/kota berarti desa menjadi subordinat kabupaten/kota dalam hubungan wilayah administrasi dan/atau dekonsentrasi. dengan demikian, desa tidak berbeda dengan kelurahan yang sama-sama dibawah kabupaten/kota. model ini tidak jauh beda dengan pengaturan desa di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979.⁴

Perubahan pengaturan tentang pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah membawa konsekuensi penting terhadap elemen dasar pemerintahan, yaitu pemerintahan desa. Sekalipun tidak begitu signifikan perubahan yang di tampilkan oleh Undang-Undang tersebut di banding Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, namun dapat dipahami bahwa pengaturan soal pemerintahan desa tampaknya mengalami perhatian yang serius oleh pemerintah pusat melalui perubahan format badan-badan pelaksana dan pertanggungjawaban pemerintah desa.⁵

Istilah desa berasal dari bahasa India *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal., negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan

³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 363.

⁴ H.A. Tabrani Rusyan Op.Cit. h.13-14.

⁵ Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kaji, Teori, Konsep dan Pengembangannya*, Jakarta: Rajawali Pres, 2017, h.141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa dan perdesaan sering dikaitkan dengan pengertian *rural* dan *village* yang dibandingkan dengan kota (*city/town*) dan perkotaan (*urban*). Konsep desa dan kota merujuk pada suatu satuan wilayah administrasi atau teritorial, dalam hal ini perdesaan mencakup beberapa desa. Definisi tentang desa sendiri sampai sekarang masih perlu dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang di kalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah satu dengan daerah lain berbeda budayanya.⁶

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 dijelaskan pengertian Desa yakni Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan perkara masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat perlu adanya Sistem Informasi Desa yang harus diterapkan di setiap desa.⁷

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dinyatakan bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-

⁶ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2015, h. 226.

⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Undang Dasar 1945. Dalam Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1, dinyatakan bahwa *“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten”*.⁸

Kewenangan yang salah satu dimiliki oleh desa adalah Informasi Desa yang dijalankan oleh pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Sistem Informasi Desa adalah sebuah program untuk membuka ruang partisipatif antara masyarakat dan perangkat desa dalam membangun desanya secara demokratis melalui penggunaan *software* terbuka. Secara teknis program ini diharapkan dapat membantu pemerintahan desa dan warganya mendokumentasikan data-data milik desa menjadi lebih mudah.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada bagian ketiga membahas tentang sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan terdapat pada pasal 86 menyebutkan bahwa ada hak desa untuk mendapatkan akses informasi dari daerah kabupaten/kota dan ada kewajiban Pemerintah dan Pemerintah daerah untuk membangun sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Pasal 86 ayat (1) *Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pada ayat (2) Pemerintah dan*

⁸ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18.

⁹ Apriyansyah dkk, *Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik di Desa Delingo, Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul*, JAKPP, Vol 4 No.1 Juni 2018, h. 11.



Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Ayat (3) sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.¹⁰

Dari regulasi di atas agar desa bisa mendapatkan informasi oleh desa pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menyediakan fasilitas untuk mengembangkan sistem informasi sebagaimana pada ayat 3 menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusianya sebagai pengelola untuk mendapatkan informasi serta pembangunan kawasan perdesaan dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Maka dari itu Sistem Informasi Desa penting dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan termasuk memberikan layanan informasi pemerintah desa. Dengan adanya layanan informasi pemerintah desa untuk mewujudkan transparansi informasi ke berbagai pihak. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut serta untuk mengetahui serta mengawasi kebijakan pemerintah desa, serta ikut berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pemerintah desa. Sistem Informasi Desa akan memberikan akses publik akan informasi sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Menurut kepala Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, sistem informasi desa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa belum ada diterapkan di desa tersebut. Lebih lanjut Kepala Desa Banglas Barat menyatakan bahwa, baru

¹⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



mengetahui keberadaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut ketika penulis mewawancarainya dalam kegiatan pra riset.¹¹ jadi berdasarkan hasil prariset tersebut penulis melihat belum program lanjut pemerintah daerah untuk menerapkan undang-undang tersebut dengan membuat sistem informasi desa yang diterapkan di desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti yang sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang di jelaskan dalam pasal 86.

Dengan adanya temuan permasalahan di atas penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah tentang Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan mengambil batasan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini di fokuskan pada bagaimana Penerapan Sistem Informasi Desa di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dan faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penerapan sistem informasi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Sistem Informasi Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa di desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti?

¹¹ Asnawi Nazar, Kepala Desa Banglas Barat, *Wawancara*, 10 September 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor yang mempengaruhi Penerapan Sistem Informasi Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan sistem informasi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Untuk mengetahui faktor mempengaruhi terhadap penerapan sistem informasi Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai Penerapan Sistem Informasi Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Sistem Informasi Desa.
- b. Menjadi referensi bagi praktisi dan *stakeholder* dalam menerapkan sistem informasi desa di desa.

3. Secara Akademis

- a. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
- b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengembangan sistem informasi desa.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹² Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis

¹² HB Satopo, *Metode Penelusuran Kualitatif*, (Surakarta: UN Press 1999), h. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹³

1. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yaitu metode pendekatan hukum sosiologis, dimana penelitian ini dilakukan pada responden yang bekerja sebagai aparat desa yang menjalankan pemerintahan desa dalam mengolah informasi dengan Sistem Informasi Desa. Dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini terletak di desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.¹⁴

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: sinar Grafika, 2011), h. 24

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

populasi.¹⁵ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.¹⁶

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala dinas komunikasi dan informasi	1 orang	1 orang	100%
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 orang	1 orang	100%
3	Kepala desa	1 orang	1 orang	100%
4	Masyarakat yang berusia dari 20-50 tahun	3.045 orang	91 orang	3%
Jumlah		3.048 orang	94 orang	3.08%

¹⁵ *Ibid*, h. 124

¹⁶ Jurnal Analisis, Desember 2017, Vol. 6 No. 2: 188-193

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jenis dan Sumber data

a. Data Primer

Data ini peneliti peroleh secara langsung dari lapangan sebagai obyek penulisan dalam penelitian. Dengan cara mewawancarai yang di tujukan kepada narasumber untuk memperoleh data.

b. Data Sekunder

Data ini peneliti peroleh secara tidak langsung, karena penelitian memperoleh data melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan data-data yang diperoleh dari tempat penelitian yang dilakukan.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan skunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a) Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian, Hasil dari pengamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

b) Wawancara

Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti.

c) Angket

Peneliti menggunakan angket yang disebarakan kepada narasumber yang berisikan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan.

6. Teknik Analisis data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dimana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan informasi dideskripifkan (dijabarkan) secara menyeluruh, kemudian data tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang konsep- konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi tentang konsep pemeritahan daerah dan pemerintahan desa.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi penerapan Sistem Informasi Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. serta faktor yang mempengaruhi penerapan Sistem Informasi Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**



BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Banglas Barat

Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu desa di Kecamatan Tebing Tinggi yang terletak dipulau Tebing Tinggi, yang mana merupakan Desa pemekaran dari Desa Banglas (Desa Induk) berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor : 10 Tahun 2004, tanggal 28 Juni 2004, dengan luas wilayah 16.44 KM², dengan batas wilayah desa sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Desa Alah Air Timur dan Kelurahan Selatpanjang Selatan
- Sebelah Timur dengan Desa Banglas
- Sebelah Selatan dengan Desa Lukun
- Sebelah Barat Dengan Desa Alah Air Timur Dan Desa Sesap

Jumlah Penduduk Desa Banglas Barat sekitar 5855 Jiwa terdiri dari 2884 jiwa laki - laki , 2971 jiwa perempuan dan 1338 KK, ketinggian Desa dari permukaan Laut sekitar 2 meter, dengan suhu rata – rata 24 °C - 32 °C, curah hujan 2000 – 3000 MM/tahun.¹⁷

Desa Banglas Barat terdiri dari 4 (Empat) Dusun (Dusun Perumbi, Dusun Rintis, Dusun Bandar Suir dan Dusun Semulut, 7 (Tujuh) RW dan 20 (Dua Puluh) RT. Mata pencaharian masyarakat Desa banglas Barat sebahagian besar adalah

¹⁷ Profil Desa Banglas Barat, *Sekapur Sirih*, Tahun 2018, h. 1



buruh harian lepas dan pencari kayu bakau (T. Ki) dengan tingkat pendidikan sebahagian besar adalah tamat SD (Sekolah Dasar), serta beragama Islam seluruhnya dengan kondisi keamanan aman dan kondusif.¹⁸

B. Legenda dan Lokakarya Desa Banglas Barat

1. Legenda Desa Banglas Barat

Pada masa dahulu desa Banglas Barat belumlah dikenal seperti sekarang ini, dulu lebih di kenal dengan sebutan Suir Kiri karena sungainya bercabang dua ada yang kiri dan ada yang kanan, yang kanan berada di kawasan desa Lalang Tanjung, sedangkan yang kiri baru ke Banglas Barat.

Desa Banglas Barat berbatas sebelah utara dengan desa Banglas sebelah barat dengan desa Lalang Tanjung Sebelah timur dengan Desa Sungai Tohor dan sebelah selatan berbatas dengan desa Kepau Baru.

Desa Banglas Barat sebelumnya mempunyai beberapa orang Penghulu, pada masa dahulu di disebut penghulu Pertama yang ditunjuk adalah Almarhum Mumin setelah penghulu Mumin tidak bisa lagi bertugas maka ditunjukkan sebagai pengganti Almarhum Nin, karena pada masa dulu belum ada pemilihan siapa yang disukai masyarakat maka pemerintah Kabupaten Bengkalis akan mengangkatnya jadi penghulu dimasa itu.

Setelah Penghulu Nin mengundurkan diri karena sudah tua maka diangkatlah almarhum Dun di zaman penghulu Almarhum Dun, belum juga ada kemajuan karena zaman Jepang beberapa tahun Almarhum Dun memimpin tak

¹⁸ *Ibid*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mampu lagi. Lalu ditunjuk pula penghulu Almarhum Berang yang disukai masyarakat, setelah beberapa tahun Almarhum Berang tak bisa lagi menjabat sebagai penghulu karena usianya sudah tua, pilihan masyarakat sebagai penghulu jatuh kepada Almarhum Penghulu Kotot Montel, yaitu mulai tahun 1953. penghulu Kotot Montel menjabat selama 20 tahun yaitu sekitar tahun 1953 sampai 1973. Penghulu Kotot Montel mengundurkan diri. Lalu masyarakat memilih Almarhum Sapi'i Lasa, di tahun 1991 Penghulu Sapi'I meninggal dunia, dilanjutkan oleh sekretarisnya yaitu Sahari sampai tahun 1995, pada tahun 1995 terjadi pemilihan kembali, pemilihan tersebut dimenangi oleh Saudara Mustapa Muhammad.

Pada masa Kepala Desa Mustapa desa Banglas Barat sudah mulai menampakkan kemajuannya. Hal ini dilihat dari Jalan-jalan desa mulai diaspal, desa Banglas Barat dikenal juga lewat MTQ dan sepak bola. Pertumbuhan ekonomi juga ikut berkembang. Saudara Mustapa mampu menjadi kepala desa sampai tahun 2003. pada tahun 2003 diadakan Pemilihan Kepala Desa dan A. Rauf Kotot terpilih sebagai Kepala Desa Banglas Barat sampai pada tahun 2009, pada tahun 2009 diadakan pemilihan kembali, dan saudara A. Rauf kembali menang mutlak, menjadi Kepala Desa Banglas Barat sampai hari ini, Desa Banglas Barat makin berkembang seperti pendidikan sudah ada MTs, SMP dan transportasi pun sudah lancar.¹⁹

¹⁹ Ibid, h. 2-4

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Lokakarya Desa Banglas Barat

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakarya di tingkat desa yang dilaksanakan tanggal 23 s/d 1 Oktober 2010 dengan tahapan sebagai berikut :²⁰

- 1). Mengkompilasikan dan mengelompokkan masalah-masalah dari hasil musyawarah dusun,
- 2). Menyusun legenda dan sejarah desa
- 3). Menyusun Visi/Misi desa
- 4). Membuat skala prioritas

Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.

- 5). Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.

Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.

²⁰ *Ibid*, h. 8



6). Menetapkan tindakan yang layak

Pada tahapan ini dipilih dan tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan skala Desa dan pembangunan skala Kabupaten.

C Visi dan Misi Desa Banglas Barat

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Banglas Barat ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Banglas Barat seperti pemerintah desa, BPD, Tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut menjadikan Visi Desa Banglas Barat adalah :“
Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Baik Bidang Ekonomi, Sumber Daya Manusia, Keamanan, Serta Membina Semangat Persatuan Dan Kesatuan”.

2. Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



potensi dan kebutuhan Desa Banglas Barat, maka misi Desa Banglas Barat adalah :

- 1). Meningkatkan sumber daya manusia, bebas dari kebodohan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- 2). Mempercepat pembangunan infrastruktur dengan mengembangkan swadaya dan memupuk semangat gotong royong masyarakat.
- 3). Meningkatkan keamanan bagi masyarakat menuju desa cemerlang dan gemilang.

D. Prasarana dan Sarana Pendidikan dan Peribadatan

1. Prasarana Pendidikan

Desa Banglas Barat merupakan salah satu Desa yang berada di kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dengan jumlah penduduk usia sekolah relatif cukup banyak, oleh karena itu di desa ini diperlukan tersedianya prasarana pendidikan yang memadai dan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penduduk desa setempat. Adapun prasarana pendidikan di desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi kabupaten Kepulauan Meranti yaitu terdapat pada tabel berikut:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II. 1
Prasarana Pendidikan

No. Jenis Pendidikan	NEGERI			SWASTA		
	Gedung	Guru	Murid	Gedung	Guru	Murid
	Buah	Orang	Orang	Buah	Orang	Orang
1. Kelompok bermain	-	-	-	2	6	70
2. TK	-	-	-	2	6	70
3. Sekolah Dasar	2	27	450	-	-	-
4. SMP	-	18	352	-	-	-
5. SMA	-	-	-	-	-	-
6. Akademisi	-	-	-	-	-	-
7. Instititusi/ Sekolah Tinggi/ Universitas	-	-	-	-	-	-
Jumlah	2	45	802	4	12	140

Sumber : Kantor Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi

2. Prasarana Peribadatan

Prasarana peribadatan di desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi yaitu seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel II. 2
Prasarana Peribadatan

No	Prasarana Peribadatan	Jumlah (Unit)
1.	Mesjid	4
2.	Musholla	2

Sumber : Kantor Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka prasarana peribadatan yang ada di desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi yaitu masjid sebanyak 4 unit, dan musholla terdapat 2 unit, tersedianya prasarana peribadatan di perdesaan akan mendukung upaya peningkatan keagamaan bagi masyarakat desa



setempat. Jumlah penduduk pada desa Banglas Barat sebanyak 5855 jiwa sebagai bentuk peningkatan pemahaman keagamaan warga dibutuhkan penambahan sarana peribadatan untuk mengimbangi jumlah warga yang ada di desa Banglas Barat.

E. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Banglas Barat

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Desa Banglas Barat memiliki banyak mata pencaharian.

Table II. 3
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Pencaharian	Jumlah
1	PNS	20
2	ABRI	-
3	Swasta	16
4	Wiraswasta	119
5	Tani	105
6	Pertukangan	35
7	Buruh Tani	56
8	Pensiunan	4
9	Nelayan	85

Berdasarkan tabel diatas masyarakat desa Banglas Barat banyak berprofesi sebagai wiraswasta dan kemudian juga sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.²¹

²¹ Monografi Desa Banglas Barat, Tahun 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Organisasi Pemerintahan Desa Banglas Barat

Pemerintahan Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Organisasi Pemerintahan Desa Banglas Barat tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Desa, yang dibantu sejumlah perangkat desa, yaitu:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kepala Urusan Pemerintah
4. Kepala Urusan Pelayanan Umum
5. Kepala Urusan Pemberdayaan
6. Kepala Urusan Pemberdayaan Perempuan
7. Kepala Urusan Sosial
8. Kepala Dusun

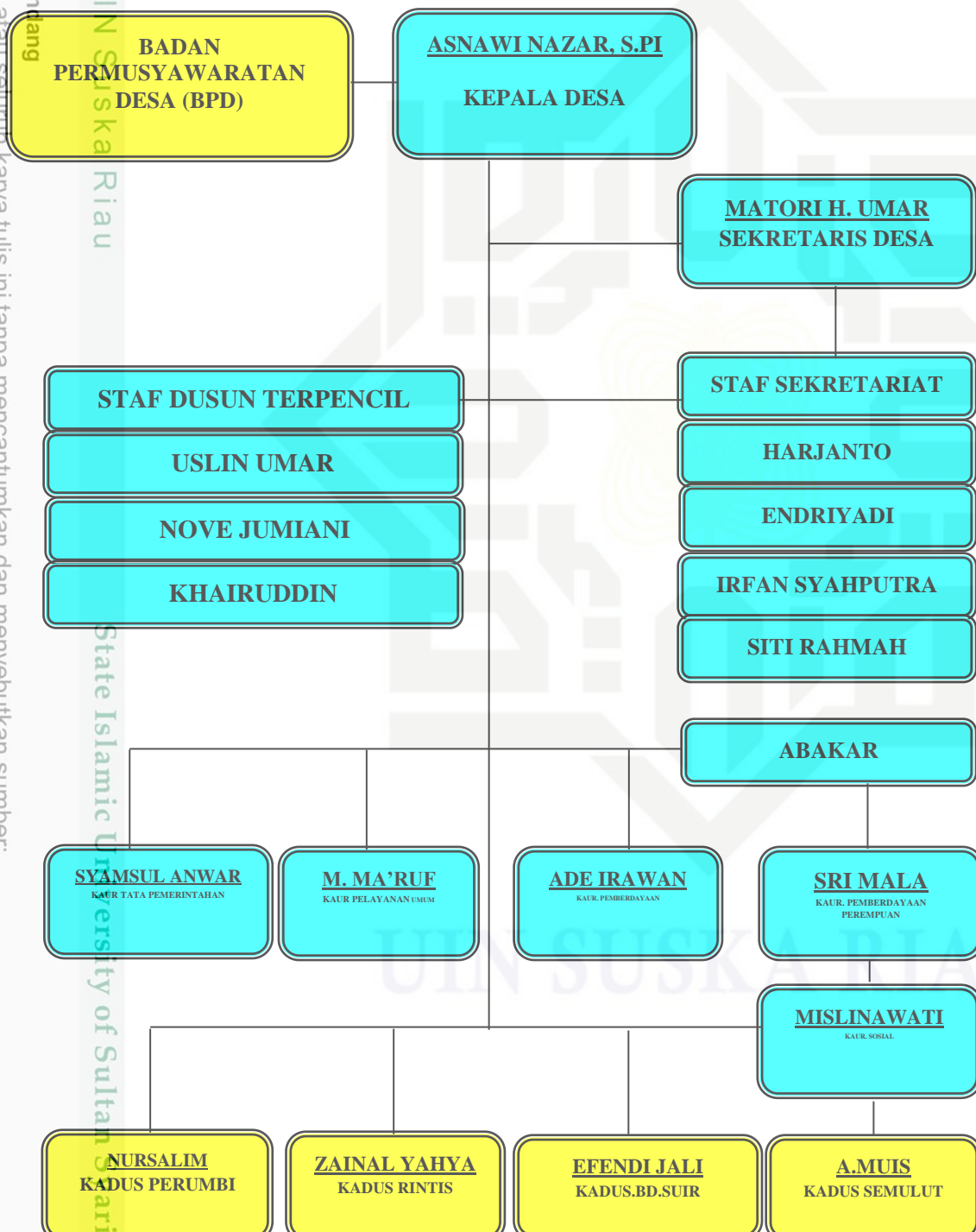
Sementara itu organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bidang Pemerintahan
4. Bidang Pemuda dan Peran Wanita
5. Bidang Lingkungan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun struktur organisasi Pemerintahan Desa Banglas Barat dapat dijelaskan melalui gambar dibawah ini:

Gambar II.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sistem Informasi Desa

Sistem informasi desa merupakan seperangkat alat meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia yang dikelola oleh pemerintah desa untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data desa yang diatur dalam bagian ketiga Undang-Undang Desa Pasal 86.²²

Sistem Informasi Desa yang pada awalnya disebut SIDES hingga akhirnya menjadi SID memiliki dua pengertian, dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit SID dimaksudkan sebagai sebuah aplikasi yang membantu pemerintah desa dalam mendokumentasikan data-data milik desa guna memudahkan proses pencariannya. Sedangkan dalam arti luas, SID diartikan sebagai suatu rangkaian atau sistem (baik mekanisme prosedur hingga pemanfaatan) yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada di komunitas.²³

1. Pengertian Informasi

Istilah informasi sudah sangat dikenal sejak dua dasawarsa yang lalu. Kata dasar *inform* bahkan sudah ada sejak abad ke 14 Masehi. Kata atau istilah informasi saat ini sudah sangat dikenal sehingga hampir semua bidang mengakui informasi sebagai bagian dari konsepsi yang mewarnainya. Terkait dengan konteks ini, maka informasi pun menjadi berbeda-beda, sebab akan

²² <https://www.panda.id/sistem-informasi-desa>, diakses pada tanggal 14/10/ 2019. Pkl. 10.00 WIB.

²³ Ahkmad Nasir, dkk, *Panduan Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) dan Monitoring Partisipatif*, (Yogyakarta: Merapi Recovery Response, 2013), h. 23



selalu diwarnai oleh sudut pandang penggagasnya, pengelola, kepentingan, teori, penggunaan, atau konteks-konteks lainnya.²⁴

Dalam konteks perundang-undangan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi di definisikan sebagai “keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.”²⁵

Beberapa definisi Informasi menurut para ahli sebagai berikut :

- a. H Abdul Kadir McFadden mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut.
- b. Menurut Anton M. Meliono informasi adalah data yang telah diproses untuk suatu tujuan tertentu. Tujuan informasi adalah untuk menghasilkan sebuah keputusan.
- c. Azhar Susanto dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi, menyatakan bahwa informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat.

²⁴ Pawit M. Yusuf, *Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan Edisi Kedua*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 1

²⁵ Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 Ayat (2).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Burch dan Strater menyatakan bahwa **informasi adalah** pengumpulan atau pengolahan data untuk memberikan pengetahuan atau keterangan.

Menurut George H. Bodnar informasi adalah data yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat.

George R. Terry berpendapat bahwa **informasi adalah** data yang penting yang memberikan pengetahuan yang berguna.

Menurut Gordon B. Davis informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.

h. Jogianto dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi, berpendapat bahwa informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya.

i. Menurut Jogiyanto HM, informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian – kejadian (*event*) yang nyata (*fact*) yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

Lani Sidharta berpendapat bahwa informasi adalah data yang disajikan dalam bentuk yang berguna untuk membuat keputusan.

Raymond Mc.leod menyatakan bahwa informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.

Menurut Tata Sutabri, informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.²⁶

B. Kedudukan Informasi Bagi Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kedudukan informasi bagi masyarakat desa sangatlah penting sekali sebagaimana yang di amankan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terdapat pada Pasal 86. Di dalam pasal tersebut pemerintah diwajibkan untuk menerapkan sistem informasi desa di desa untuk kepentingan masyarakat desa. Informasi tersebut bisa di akses oleh masyarakat desa dan pemerintah menyediakan informasi tersebut sebagai sebuah transparansi dalam pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Di era globalisasi sekarang ini informasi sangatlah dibutuhkan bagi semua kalangan tidak hanya masyarakat di perkotaan tetapi juga masyarakat di pedesaan. Sistem informasi desa sebagai salah satu penunjang dalam memperoleh informasi, Aplikasi Sistem Informasi Desa digunakan untuk membantu kinerja Pemerintah Desa sehingga dapat lebih efisien dalam pengelolaan administrasi dan data desa. Berikut ini dijelaskan secara singkat beberapa manfaat sistem informasi desa menurut pengertian di atas :²⁷

²⁶ Ashri Nooraida Permana, *Teori Informasi dan Kepustakaan*, (Departemen Informasi dan Perpustakaan, Universitas Padjadjaran, 2013), h. 1-2.

²⁷ <https://github.com/OpenSID/opensid/wiki/Peran-dan-Manfaat-Sistem-Informasi-Desa>, di akses pada tanggal 02/11/2019. Pkl. 21.03 Wib.



1. Mempercepat Pengelolaan Data Desa

Pengelolaan data desa seperti data kependudukan, sarana & prasarana, anggaran desa, dan lain sebagainya dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Selain cepat dan mudah, dengan menggunakan aplikasi sistem informasi desa data desa dapat disimpan dengan aman didalam sistem dan lebih mudah dalam pencarian data menggunakan fitur pencarian yang disediakan aplikasi.

2. Mempercepat Pelayanan Desa

Pelayanan administrasi desa konvensional sangat menyita waktu. Aplikasi sistem informasi desa yang dibangun dengan baik dapat mempercepat waktu pelayanan desa.

3. Memanfaatkan Data Desa

Desa dapat memanfaatkan data yang terdapat dalam sistem untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, keterbukaan informasi publik, perencanaan dan pembangunan ditingkat desa, perencanaan dan pembangunan ditingkat kabupaten/kawasan, serta pengelolaan sumber daya desa secara mandiri oleh komunitas/warga desa.

4. Transparansi Pemerintah Desa

Pemerintah Desa dapat melaksanakan kewajiban transparansi desa dengan memanfaatkan webside desa yang terintegrasi dengan aplikasi SID sebagai media keterbukaan informasi desa. Warga juga dapat ikut memantau informasi yang desa umumkan melalui website resmi desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Kantor desa lebih efisien

Misalnya, dengan memakai OpenSID, kantor desa dapat menyediakan layanan surat keterangan pada warga jauh lebih cepat dibandingkan cara manual. Dengan OpenSID, data penduduk sudah tersimpan dan dapat diisikan secara otomatis pada surat yang bisa dicetak langsung.

6. Kantor desa lebih efektif

Sebagai contoh, karena Sistem Informasi Desa menyimpan data penduduk beserta atribut-atributnya, kantor desa dapat dengan mudah memilah data penduduk secara akurat berdasarkan kriteria yang diinginkan, sehingga bisa menargetkan suatu program pemerintah secara tepat sasaran. Ini berbeda dengan proses serupa tanpa SID, di mana sering dilakukan penentuan sasaran program secara kira-kira dan tidak berbasis data.

7. Pemerintah desa lebih transparan

Dengan Sistem Informasi Desa, pemerintah desa dapat mengelola informasi kegiatan desa dalam bentuk yang mudah disajikan kepada warga dan lebih mudah diakses warga. Misalnya, kantor desa dapat memakai Sistem Informasi Desa untuk mengelola informasi perencanaan pengembangan desa dan menampilkan informasi tersebut pada berbagai media, seperti di web desa, papan pengumuman dan sebagainya.

8. Pemerintah desa lebih akuntabel

Dengan adanya informasi perencanaan, kegiatan pembangunan, penggunaan dana desa dan sebagainya di dalam Sistem Informasi Desa yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mudah diakses warga, pemerintah desa akan dituntut untuk lebih akuntabel. Kantor desa akan mempunyai kesempatan untuk secara lebih mudah membuat laporan pertanggung-jawaban kegiatan, penggunaan dana desa dan sebagainya.

9. Layanan publik lebih baik

Seperti disebut di atas, dengan Sistem Informasi Desa kantor desa akan lebih efisien dan lebih efektif dalam melakukan fungsi dan tugas mereka. Karena salah satu tugas utama kantor desa adalah memberi layanan publik, fungsi ini pun akan lebih baik. Contoh sederhana yang diberikan di atas, warga akan bisa memperoleh surat keterangan yang mereka butuhkan secara lebih cepat dan dengan data yang lebih akurat.

10. Warga mendapat akses lebih baik pada informasi desa

Dengan Sistem Informasi Desa, informasi kependudukan, perencanaan, asset, anggaran dan sebagainya akan terrekam secara elektronik. Semua informasi tersebut mempunyai potensi untuk lebih mudah diakses oleh warga. Kantor desa mempunyai kesempatan untuk menyediakan fasilitas bagi warga untuk mengakses informasi desa dengan mudah, misalnya dengan menerbitkan informasi desa di website desa. Karena tahu data itu ada, warga juga mempunyai kesempatan untuk menuntut kantor desa untuk menyediakan akses pada informasi yang mereka butuhkan.

11. Warga dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan desa

Ketersediaan data dan informasi desa yang mudah diakses akan meningkatkan potensi warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Warga akan tahu kegiatan apa yang sedang berjalan dan apa yang direncanakan, sehingga dapat ikut mengawal kegiatan tersebut ataupun memberi usul, saran dan masukan lain terkait pembangunan desa. Lebih dari itu, Sistem Informasi Desa juga mempunyai potensi untuk menyediakan media elektronik untuk menggalang partisipasi warga, seperti forum diskusi atau formulir komentar/usulan elektronik.

Sistem informasi desa berperan sebagai sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang terdapat pada Pasal 86 menyebutkan:

- (1) Desa berhak mendapatkan akses Informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.²⁸

C. Sistem Informasi Desa dalam Rangka Penerapan Otonomi Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, dan negara hukum, ketentuan konstitusional ini memberikan pesan negara Republik Indonesia dibangun dalam bentuk kerangka negara yang berbentuk kesatuan, bukan federasi. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini berarti negara kesatuan Republik Indonesia secara hierarki struktural terbagi atas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disisi lainnya. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan:

“Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota mempunyai pemerintahan daerah, yang di atur dengan Undang-Undang.”

Ateng Sjarifudin mengatakan bahwa istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atas kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian yang harus di pertanggung jawabkan.²⁹

Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. Kewenangan daerah

²⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 86.

²⁹ Hestu Cipto Handoyo, *Otonomi Daerah dan Titik Berat Urusan Rumah Tangga Daerah*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1998), h. 27



kabupaten dan daerah kota mencakup semua kewenangan daerah selain kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama dan kewenangan bidang lain. Dengan demikian kewenangan daerah Kabupaten dan daerah kota sangat luas.³⁰

Otonomi daerah merupakan perwujudan dari sistem desentralisasi yang membagi wewenang dari pemerintahan pusat ke daerah, atau otonomi daerah dapat diartikan sebagai pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”³¹

Definisi mengenai otonomi daerah bukanlah definisi yang tunggal, karena banyak sarjana yang memberikan definisi tersendiri.

1. Menurut C.W. Van Der Pot, memahami konsep otonomi daerah sebagai menjalankan rumah tangganya sendiri. Selain itu, otonomi juga diartikan sebagai suatu hak rakyat untuk mengatur pemerintah di daerah dengan cara sesuai dengan hukum, adat, dan tata kramanya. Otonomi yang demikian disebut sebagai otonomi yang mendasar dan *indigenous*.
2. Ni'matul Huda mengatakan bahwa otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara

³⁰ Sri Somantri, *Otonomi Daerah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 26.

³¹ Yusnani Hasyimzoem, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: Raja wali Pres, 2018), h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pusat dan daerah. Ini berarti bahwa konsep otonomi searah yang diartikannya merupakan urusan rumah tangga daerahnya sendiri dengan tetap memperhatikan aturan yang telah diatur oleh pemerintah pusat.

3. Syarif saleh mengartikan otonomi sebagai hak mengatur dan memerintah daerah sendiri, atas inisiatif dan kemauan sendiri di mana hak tersebut diperoleh dari pemerintah pusat. Adapun menurut wayong bahwa otonomi daerah itu merupakan suatu kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan daerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan berpemerintahan sendiri.³²

Penerapan sistem informasi desa merupakan salah satu dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dimana sistem informasi desa disediakan oleh pemerintah daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan untuk desa. Inisiatif inilah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahannya dari pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten sampai ke pemerintahan desa yang saling bersinergi dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berdasarkan undang-undang dan mendapatkan mandat dari pemerintahan pusat.

³² *Ibid*, h. 14-15.



D. Penerapan Sistem Informasi Desa Merupakan Perwujudan dari Asas Pemerintahan yang Baik dan Layak

Ada beberapa asas yang menjadi patokan dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan patut. Menurut rangkuman Crince Le Roy dalam kuliahnya pada penataran Lanjutan Hukum Tata Usaha Negara /Hukum Tata Pemerintahan di Fakultas Hukum Unair 1978 Crince Le Roy mengemukakan 11 (sebelas) butir asas³³ dan di tambah dengan Kuntjoro Purbopranoto adalah sebagai berikut :³⁴

1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum materil, yang lain bersifat formal. Aspek hukum materil terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepanjangan. Dengan kata lain asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan. Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta keputusan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada keputusan-keputusan yang menguntungkan,

³³ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 133

³⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 245-264

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus disusun dengan kata-kata jelas. Asas kepastian hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya. Unsur ini memegang peran misalnya pada pemberian kuasa surat-surat perintah secara tepat dan dengan tidak mungkin adanya berbagai penafsiran yang dituju harus dapat terlihat, kewajiban-kewajiban apa yang dibebankan kepadanya. Asas ini berkaitan dengan asas *het vermoeden van rechtmatingheid* atau *presumptio justea causa*, yang berarti setiap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi.

2. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukum jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum. Artinya terhadap pelanggaran atau kelapaaan serupa yang dilakukan orang yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia asas keseimbangan ini terdapat contoh dalam hukum positif yang berisi kriteria pelanggaran dan penerapan sanksinya, yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai. Di dalam pasal tersebut ditentukan sebagai berikut.

- 1) Hukum disiplin berupa;
 - a) Teguran lisan.
 - b) Teguran tertulis; dan
 - c) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- 2) Hukuman disiplin sedang berupa;
 - a) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk selama 1 (satu) tahun.
 - b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- 3) Hukuman disiplin berat berupa;
 - a) Penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c) Pembebasan dari jabatan;
 - d) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - e) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan

Asas ini menghendaki agar badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktanya sama. Meskipun demikian, agaknya dalam kenyataan sehari-hari sukar ditemukan adanya kesamaan mutlak dalam dua atau lebih kasus. Oleh karena itu, menurut Philipus M. Hadjon, asas ini memaksa pemerintah untuk menjalankan kebijakan. Bila pemerintah dipaksa pada tugas baru yang dalam rangka itu harus mengambil banyak sekali keputusan tata usaha negara, maka pemerintah memerlukan aturan-aturan atau pedoman-pedoman. Bila pemerintah sendiri menyusun aturan-aturan (pedoman-pedoman) itu untuk memberi arah pada pelaksanaan wewenang bebasnya, maka itu disebut aturan-aturan kebijakan. Jadi tujuan aturan-aturan kebijakan ialah menunjukkan perwujudan asas perlakuan yang sama atau asas persamaan yang berlaku bagi setiap orang.

Karena tidak ada kasus yang mutlak sama dengan kasus lain kendatipun tampak serupa, maka ketika pemerintah menghadapi berbagai kasus yang tampaknya sama itu, ia harus bertindak dapat pula menerapkan KTUN yang pernah dikeluarkan pada kasus yang faktanya sama. Akan tetapi, bukan berarti dapat menerapkan KTUN yang salah atau keliru, yang pernah dikeluarkan untuk kasus-kasus sebelumnya. Asas ini terkesan kabur bila dikaitkan dengan pendapat Van Vollenhoven, yang menyatakan bahwa sifat tindakan pemerintahan itu kasuistis, artinya suatu peristiwa tertentu tidak berlaku tindakan yang sama terhadap peristiwa lainnya.

4. Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan

Asas ini menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara dan warganya. Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan, maka pemerintah harus memperhatikan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan memperhatikan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha tersebut.

Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat.

5. Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan

Asas ini menghendaki agar setiap keputusan badan-badan pemerintahan harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan dan sedapat mungkin alasan atau motivasi itu tercantum dalam keputusan. Motivasi atau alasan ini harus benar dan jelas, sehingga pihak *administrabele* memperoleh pengertian yang cukup jelas atas keputusan yang ditujukan kepadanya. Menurut SF. Marbun, setiap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan harus didasari alasan dan alasannya harus jelas, terang, benar, objektif, dan adil.³⁵ Motivasi perlu dimasukkan agar setiap orang dapat

³⁵ *Ibid*, h.250

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mudah mengetahui alasan atau pertimbangan dikeluarkannya keputusan tersebut, sehingga mereka dengan tidak puas dapat mengajukan keberatan atau banding dengan menggunakan alasan/pertimbangan atau motivasi dikeluarkannya keputusan itu sebagai titik pangkal pembahasannya. Motivasi atau alasan ini juga penting bagi hakim administrasi utamanya untuk menilai putusan yang disengketakan itu dengan membaca motivasinya. Asas pemberian alasan ini dapat dibedakan dalam tiga subvarian ini yaitu :

- a. Syarat bahwa suatu keputusan harus diberi alasan

Pemerintah harus dapat memberi alasan mengapa ia mengambil suatu keputusan tertentu. yang berkepentingan berhak mengetahui alasan-alasannya. Bila suatu keputusan merugikan satu orang atau lebih yang berkepentingan, pemerintah yang baik mensyaratkan bahwa pemberian alasan sedapat mungkin segera diberitahukan bersama-sama dengan keputusan. Agar perlindungan hukum administrasi dapat berfungsi dengan baik, hak memperoleh alasan-alasan dari suatu keputusan ini penting sekali. Sebab yang berkepentingan tidak dapat menyusun argumentasi yang baik dalam permohonan banding atau surat keberatannya, bila ia tidak mengetahui dasar-dasar apa yang dipakai untuk keputusan yang merugikan dirinya. Juga bagi hakim tersedianya dasar-dasar ini merupakan keharusan, karena sukar untuk menilai isi dari keputusan yang diambil, tanpa memiliki argumentasi penguasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Keputusan harus memiliki dasar fakta yang teguh

Fakta harus menjadi titik tolak dari keputusan, bila ternyata bahwa fakta-fakta pokok berbeda dari apa yang dikemukakan atau diterima oleh badan pemerintah, maka dasar fakta yang teguh dari alasan-alasan tidak ada. Dalam hal ini biasanya terdapat cacat kecermatan.

- c. Pemberian alasan harus cukup dapat mendukung

Pemberian alasan harus masuk akal juga secara keseluruhan harus sesuai dan memiliki kekuatan yang meyakinkan. Karena pada umumnya hampir semua cacat dalam keputusan dapat dikembalikan pada cacat dalam pemberian alasan. Begitu pula keadaan-keadaan interpretasi undang-undang yang keliru dari pada bertentangan dengan peraturan yang keliru atau suatu aturan kebijakan, mengarah pada kesimpulan adanya pemberian alasan yang cacat.

6. Asas Tidak Mencampuradukan kewenangan.

Setiap pejabat pemerintah memiliki wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan pada asas legalitas. Dengan wewenang yang diberikan itulah pemerintah melakukan tindakan-tindakan hukum dalam rangka melayani atau mengatur warga negara. Kewenangan pemerintah secara umum mencakup tiga hal; kewenangan dari segi material, kewenangan dari segi wilayah, dan kewenangan dari segi waktu.³⁶ Seorang pejabat pemerintah memiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

³⁶ *Ibid*, h. 252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik dari segi materi, wilayah, maupun waktu. Aspek-aspek wewenang ini tidak dapat dijalankan melebihi apa yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Artinya asas tidak mencampuradukkan kewenangan ini menghendaki agar pejabat tata usaha negara tidak menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenang yang melampaui batas.

Di dalam UU No. 5 Tahun 1986 terdapat dua jenis penyimpangan penggunaan wewenang, yaitu penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang, yang disebutkan dalam pasal 53 ayat (2) huruf b dan c yang berbunyi sebagai berikut:³⁷

(a) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

(b) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu. Seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

³⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 53

7. Asas Permainan yang Layak

Asas ini menghendaki agar warga negara diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi. Asas ini juga menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Adanya instansi banding akan memungkinkan terealisasinya asas ini, karena warga negara yang tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama masih diberi kemungkinan untuk mencari kebenaran dan keadilan, baik melalui instansi pemerintah yang lebih tinggi atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan administrasi. Maupun melalui badan peradilan tata usaha negara yang lebih tinggi.

Asas ini penting dalam peradilan administrasi negara karena terdapat perbedaan kedudukan antara pihak penggugat dengan tergugat. Pejabat selaku pihak tergugat secara politis memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan penggugat. Selaku pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi, tergugat akan lebih sukar untuk mengakui kekeliruan atau kesalahan yang dilakukannya karena hal ini berkaitan dengan kredibilitas dan harga diri dari pejabat negara yang bersangkutan.

Instansi yang mengeluarkan keputusan tidak boleh menghalang-halangi seseorang yang berkepentingan untuk memperoleh keputusan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan menguntungkan baginya. Bila seorang yang terkena keputusan itu mengajukan banding administratif, lalu instansi yang menerbitkan keputusan itu berusaha menekan atau mempengaruhi instansi banding, maka putusannya dapat dibatalkan karena bertentangan dengan asas permainan yang layak. Menurut Philipus M. Hadjon, sejak 1 Mei 1980 asas ini tidak lagi dipergunakan di Belanda, karena Belanda telah memiliki undang-undang keterbukaan pemerintah.³⁸

Asas keterbukaan diangkat dari asas demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan yang menunjukkan bahwa asas demokrasi tidak saja dilaksanakan melalui badan perwakilan rakyat, tetapi juga oleh setiap warga masyarakat sehubungan dengan tindak pemerintahan berupa keputusan. Dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan asas keterbukaan semakin penting terutama setelah bergemanya isu demokratisasi.

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan negara hukum demokratis, keberadaan asas keterbukaan tidak dapat diabaikan. Asas keterbukaan ini mempunyai fungsi-fungsi penting, yaitu: *pertama*, fungsi partisipasi, keterbukaan sebagai alat bagi warga untuk ikut serta dalam proses pemerintahan secara mandiri; *kedua*, fungsi pertanggungjawaban umum dan pengawasan keterbukaan; pada satu sisi sebagai alat bagi penguasa untuk memberi pertanggungjawaban di muka umum, pada sisi lain sebagai alat bagi warga untuk mengawasi penguasa; *ketiga*, fungsi

³⁸ *Ibid*, h. 256

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepastian hukum; keputusan-keputusan penguasa tertentu yang menyangkut kedudukan hukum para warga demi kepentingan kepastian hukum harus dapat diketahui, jadi harus terbuka; *keempat*, fungsi hak dasar; keterbukaan dapat mengajukan penggunaan hak-hak dasar seperti hak pilih, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan hak untuk berkumpul dan berbicara. Meskipun asas ini demikian penting, namun belum mendapat kajian serius dalam berbagai literatur Hukum Administrasi Negara, yang banyak tecantum adalah asas permainan yang layak.

8. Asas Keadilan dan Kewajaran

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang. Karena itu setiap pejabat pemerintah dalam melakukan tindakannya harus selalu memperhatikan aspek keadilan ini. Sedangkan asas kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah atau administrasi negara memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat, baik itu berkaitan dengan agama, moral, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya.

Asas Kepercayaan dan Menanggapi Penghargaan yang Wajar

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Oleh karena itu, aparat pemerintahan harus memperhatikan asas ini sehingga jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah. Menurut Indroharto, asas ini muncul karena dua sebab: *pertama*, harapan-harapan dapat terjadi dengan perundang-undangan, perundang-undangan semu, dengan garis tetap keputusan-keputusan yang sampai detik ini tetap secara konsisten dilakukan penguasa, penerangan dan penjelasan-penjelasan yang telah diberikan oleh penguasa yang bersangkutan, kesanggupan-kesanggupan yang telah dikeluarkan, penetapan yang sebelumnya dikeluarkan, suatu perjanjian yang telah dibuat, atau dengan perbuatan-perbuatan faktual penguasa, dengan memberikan keadaan ilegal berjalan beberapa waktu; *kedua*, syarat disposisi, atau dengan kepercayaan yang telah ditimbulkan itu seseorang telah berbuat sesuatu yang kalau kepercayaan itu tidak ditimbulkan pada dirinya, ia tidak akan berbuat demikian. Contohnya dia mengira gajinya mesti naik sekian di bulan depan karena sudah diberitahu oleh atasannya, karena ia mengadakan pengeluaran-pengeluaran yang tidak akan ia lakukan kalau ia tidak ditimbulkan kepercayaan itu pada dirinya. Setelah ia mengadakan pengeluaran ekstra, tentunya ia menderita kerugian yang disebabkan oleh kepercayaan yang ditimbulkan tersebut.

10. Asas Meniadakan Akibat suatu Keputusan yang Batal

Asas ini berkaitan dengan pegawai yang dipecat dari pekerjaannya dengan suatu surat keputusan. Seorang pegawai yang dipecat karena diduga melakukan kejahatan, tetapi setelah dilakukan proses pemeriksaan di pengadilan, ternyata pegawai yang bersangkutan tidak bersalah. Hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti surat keputusan pemberhentian yang ditujukan kepada pegawai yang bersangkutan itu harus dianggap batal. Dalam hal demikian, maka pegawai yang ternyata tidak bersalah tersebut harus dikembalikan lagi pada tempat pekerjaan semula. Bahkan tidak hanya sekedar harus ditempatkan kembali pada tempat pekerjaan semula, tapi juga harus diberi ganti rugi dan/atau kompensasi serta harus direhabilitasi nama baiknya. Proses menerapkan kembali pada pekerjaan semula, pemberian ganti rugi atau kompensasi, dan pemulihan nama baik merupakan cara-cara untuk meniadakan akibat keputusan yang batal atau tidak sah.

Di Indonesia ketentuan asas ini terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi; “setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”, pengertian rehabilitasi terdapat dalam Pasal 1 butir 23 KUHAP, yaitu hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan ataupun peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam kaitannya dengan pegawai negeri, penjelasan Pasal 21 ayat (2) No. 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa rehabilitasi merupakan pemulihan hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula, sebelumnya ada keputusan yang disengketakan. Dalam pemulihan hak tersebut termasuk juga hak-haknya yang ditimbulkan oleh kemampuan kedudukan dan harkatnya sebagai pegawai negeri.

11. Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi

Asas ini menghendaki agar pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap pegawai negeri dan juga tentunya hak kehidupan pribadi setiap warga negara, sebagai konsekuensi negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi setiap warga negara. Dengan kata lain asas ini merupakan pengembangan dari salah satu prinsip negara hukum, yakni perlindungan hak asasi.

12. Asas Kebijaksanaan

Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal. Karena peraturan perundang-undangan formal atau hukum tertulis itu selalu membawa cacat bawaan yang berupa tidak fleksibel dan tidak dapat menampung semua persoalan serta cepat ketinggalan zaman, sementara perkembangan masyarakat itu bergerak dengan cepat dan dinamis. Karena itu pemerintah bukan saja dituntut untuk bertindak cepat, tetapi juga dituntut untuk berpandangan luas dan jauh serta mampu memperhitungkan akibat-akibat yang muncul dari tindakannya tersebut. Di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia asas kebijaksanaan ini sejalan dengan hikmah kebijaksanaan, yang menurut Notohamidjojo seperti dikutip Kuntjoro Purbopranoto, berimplikasikan tiga unsur, yaitu, *pertama*, pengetahuan yang tandas dan analisis situasi yang dihadapi; *kedua*, rancangan penyelesaian atas dasar “*staatsidee*” ataupun “*rechtsidee*” yang disetujui bersama, yaitu Pancasila; *ketiga*, mewujudkan rancangan dan penjelasan yang tepat, yang dituntut oleh situasi yang dihadapi.

13. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum.

Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum, yakni kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Asas ini merupakan konsekuensi dianutnya konsepsi negara hukum modern, yang menempatkan pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan umum warga negaranya. Pada dasarnya pemerintah dalam menjalankan berbagai kegiatan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (asas legalitas), akan tetapi karena ada kelemahan dan kekurangan asas legalitas seperti tersebut di atas, pemerintah dapat bertindak atas dasar kebijaksanaan untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

Penyelenggaraan kepentingan umum dapat berwujud hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memelihara kepentingan umum yang khusus mengenai kepentingan negara. Contohnya tugas pertahanan dan keamanan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Memelihara kepentingan umum dalam arti kepentingan bersama dari warga negara yang tidak dapat dipelihara oleh warga negara sendiri. Contohnya persediaan sandang pangan, perumahan, kesejahteraan, dan lain-lain.
- 3) Memelihara kepentingan bersama yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh para warga negara sendiri, dalam bentuk bantuan negara. Contohnya pendidikan dan pengajaran, kesehatan, dan lain-lain.
- 4) Memelihara kepentingan dari warga negara perseorangan yang tidak seluruhnya dapat diselenggarakan oleh negara sendiri, dalam bentuk bantuan negara. Adakalanya negara memelihara seluruh kepentingan perseorangan tersebut. Contohnya pemeliharaan fakir miskin, anak yatim, anak cacat, dan lain-lain.
- 5) Memelihara ketertiban, keamanan, dan kemakmuran setempat. Contohnya peraturan lalu lintas, pembangunan, perumahan, dan lain-lain.

Dalam rangka menggali, menemukan dan merumuskan asas pemerintahan Indonesia yang adil dan patut ini, kiranya asas tersebut di atas dijadikan pedoman dan tolak ukur, sepanjang berkesesuaian dengan Pancasila dan UUD 1945, agama, hukum, adat dan hukum positif lainnya. Asas-asas umum pemerintahan Indonesia yang adil dan patut itu dirinci sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

1. Asas persamaan;
2. Asas keseimbangan, keserasian, keselarasan;
3. Asas menghormati dan memberikan haknya setiap orang;
4. Asas ganti rugi karena kesalahan;
5. Asas kecermatan;
6. Asas kepastian hukum;
7. Asas kejujuran dan keterbukaan;
8. Asas larangan menyalahgunakan wewenang;
9. Asas larangan sewenang-wenang;
10. Asas kepercayaan atau pengharapan;
11. Asas motivasi;
12. Asas kepantasan atau kewajaran;
13. Asas pertanggungjawaban;
14. Asas kepekaan;
15. Asas penyelenggaraan kepentingan umum;
16. Asas kebijaksanaan;
17. Asas itikad baik.³⁹

Penerapan sistem informasi desa merupakan salah satu perwujudan dari asas-asas pemerintahan yang baik dan layak yaitu asas kejujuran dan keterbukaan yang mana pemerintah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan

³⁹ *Ibid*, h. 133-134.



negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.⁴⁰

Peraturan Perundang-Undangan No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagai Aturan Sistem Informasi Desa

Di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terdapat pada bagian ketiga mengenai sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan menyebutkan tentang sistem informasi desa.

Pasal 86:

- (1) Desa berhak mendapatkan akses Informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

⁴⁰ Ridwan HR, *Op.Cit*, h. 241.



- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.⁴¹

Kewenangan Pemerintah dalam Penerapan Sistem Informasi Desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Salah satu prinsip negara hukum adalah asas legalitas yang mengandung makna bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan bersandar pada asas legalitas itulah pemerintah melakukan berbagai tindakan hukum. Karena pada setiap tindakan hukum mengandung makna penggunaan kewenangan, maka di dalam tersiratnya kewajiban pertanggung jawaban, sesuai dengan prinsip “*geen bovegedheidzonder verantwoordelijkheid.*”

Tindakan hukum pemerintahan itu selanjutnya dituangkan dalam dan dipergunakan beberapa instrumen hukum kebijaksanaan seperti peraturan perundang-undangan (*reegling*), peraturan kebijakan (*beleidsregel*), dan keputusan (*beschikking*). Di samping itu, pemerintah juga sering menggunakan instrumen hukum keperdataan seperti perjanjian dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Setiap penggunaan wewenang dan penerapan instrument hukum oleh pejabat pemerintahan pasti menimbulkan akibat hukum, karena memang dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum dan akibat hukum. Hubungan hukum ini ada yang bersifat interen (*interen rechtsbetrekking*), yakni hubungan di

⁴¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 86.



dalam hubungan hukum ekstern, akibat hukum yang ditimbulkannya ada yang bersifat umum, dalam arti mengenai setiap warganegara, dan akibat hukum yang bersifat khusus, yakni mengenai seseorang atau badan hukum perdata tertentu.

Telah jelas bahwa setiap penggunaan kewenangan itu didalamnya terkandung pertanggung jawaban, namun demikian harus pula dikemukakan tentang cara-cara memperoleh dan menjalankan kewenangan. Sebab tidak semua pejabat tata usaha negara yang menjalankan kewenangan pemerintah itu secara otomatis memikul tanggung jawab hukum. Badan atau pejabat tata usaha negara yang melakukan tindakan atas dasar kewenangan yang diperoleh secara atribusi dan delegasi adalah sebagai pihak yang memikul pertanggung jawaban hukum, sedangkan badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan tugas dan pekerjaan atas dasar mandat bukanlah pihak yang memikul tanggung jawab hukum, yang memikul tanggung jawab adalah pemberi mandat. Telah dijelaskan bahwa dalam perspektif hukum publik, yang melakukan tindakan hukum adalah jabatan yakni suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang.⁴²

1. Kewenangan Pemerintah

Setiap pelayanan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legitimasi adalah wewenang, yakni "*het vermog tot het verrichten*

⁴² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), h. 339-342



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

van bepalde rechtshandleingen”, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Mengenai wewenang itu H.D. Stout mengatakan bahwa :⁴³

“wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”

Lebih lanjut, H.D. Stout, mengatakan bahwa wewenang adalah :⁴⁴

“keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik.”

Menurut F.P.L.C. Tonnaer :⁴⁵

“kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.”

Sedangkan menurut Bagir Manan :⁴⁶

“wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*recht en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk

⁴³ Ridwan HR., *Op. Cit*, hal 100

⁴⁴ *Ibid*, h. 101.

⁴⁵ *Ibid*, h. 102

⁴⁶ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Bandung : Fakultas Hukum Unpad, 2000), h. 1-2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.”

Dalam negara hukum, yang menempatkan asas legitimasi sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintahan, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan. R.J.H.M. Huisman menyatakan :⁴⁷

“organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh Undang-Undang, pembuat Undang-Undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai, (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah), atau bahkan terhadap badan hukum privat.”

Wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan artinya, sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.⁴⁸

Mengenai atribusi, delegasi dan mandat, H.D. Van Wjik Willem Konijnenbelt mendefenisikan sebagai berikut :⁴⁹

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang—undang kepada organ pemerintahan;

⁴⁷ Ridwan HR, *Op.Cit.* h. 103.

⁴⁸ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), h. 26.

⁴⁹ *Ibid*, h. 104-105.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya;
- c. Mandat terjadi ketika ketiga organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintah melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut.⁵⁰

- a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan, artinya delegen berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan, artinya delegen memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Dalam satu kajian hukum administrasi negara, mengetahui sumber wewenang dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan sangatlah penting karena hal tersebut berhubungan dengan tanggung jawab hukum. Tidak

⁵⁰ *Ibid*, h. 105.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ada kewenangan tanpa adanya suatu pertanggung jawaban. Pemerintah atau administrasi negara merupakan subjek hukum atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Pemerintah sebagaimana subjek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata ataupun tindakan hukum. Tindakan nyata adalah tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karena itu tidak menimbulkan akibat hukum.⁵¹

Kewenangan pemerintah dalam menerapkan sistem informasi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk desa, menyediakan fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan serta sumber daya manusia. Kewenangan pemerintah desa adalah menjalankan sistem informasi desa dengan mengumpulkan serta menginput data dan dokumentasi desa ke sistem informasi desa agar supaya masyarakat bisa mengakses informasi yang dibutuhkan.

Sistem informasi desa merupakan hak dari pemerintahan desa dan merupakan kewajiban dari pemerintah kabupaten/kota, penerapan sistem informasi desa dimana pemerintah kabupaten atau kota menyediakan sarana-prasarana berupa perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan serta sumber daya manusia sebagai pengelola atau operatornya.

Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah menyediakan sistem informasi untuk diterapkan di desa sebagai wadah untuk mendapatkan informasi

⁵¹ *Ibid*, hal 113.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi masyarakat desa serta semua pemangku kepentingan. Adapun tahapan-tahapan penerapan sistem informasi desa adalah sebagai berikut:

- a. Pengorganisasian sistem informasi desa sebagai program desa

Penerapan sistem informasi desa membutuhkan keabsahan secara hukum, politik dan sosial. Keabsahan secara hukum, karena data-data yang dikelola adalah data yang penggunaanya diatur melalui undang-undang. Keabsahan politik, karena data yang dikelola melalui sistem informasi desa memiliki dampak dan sekaligus bisa digunakan secara politis dan secara sosial karena sistem informasi Desa hanya akan berfungsi optimal jika didukung dan dimanfaatkan oleh banyak pihak dalam suatu desa.

Terkait dengan sistem informasi desa, sebuah keputusan bersama, yang diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah desa dalam melayani warganya adalah sebuah keharusan. salah satu faktor yang dapat mempercepat pembangunan sistem informasi desa adalah komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari pemimpin untuk itu seorang pemimpin yang memiliki visi dan kepemimpinan yang kuat dan diperlukan.

Bentuk tim pengelola informasi

Tim pengelola informasi adalah sejumlah orang yang akan mengelola sistem informasi desa. Lingkup pengelolaan informasi mulai dari pencairan, pengelolaan, pengemasan, penyeberluasan hingga pembaruan informasi. Setiap tahap pengelolaan-pengelolaan informasi membutuhkan kecakapan yang berbeda. Kesiapan sumber daya manusia sangatlah penting dalam pembangunan sistem informasi desa. Kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau keputusan desa yang mendukung sistem informasi desa saja tidak cukup jika sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem informasi desa tidak siap atau tidak memiliki kemampuan yang memadai.

Siapkan peralatan

Agar bisa digunakan secara luas dan fleksibel, sistem informasi desa dibangun sebagai aplikasi berbasis web. Untuk mendukung kinerja aplikasi sistem informasi desa, perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi ini adalah satu computer dengan spesifikasi minimal memiliki 64 MB RAM (recommended), 200 MB ruang harddisk, sistem operasi Windows 98, ME, XP Home Windows NT, 200, XP Professional.

- d. Tentukan jenis informasi yang akan dikelola

Setiap bagian atau pihak yang berada dalam lingkup pemerintahan pasti memiliki pengalaman dan kebutuhannya sendiri terkait dengan sistem informasi, akan tetapi memenuhi semua keinginan adalah hal yang bukan saja memboroskan dana dan tenaga, namun juga berpotensi memunculkan ketidakefisienan. Ujung-ujungnya, data tersebut dan sulit untuk diperiksa keakuratannya.

Oleh karena itu, menentukan data apa saja yang akan dimasukkan ke dalam sistem informasi desa adalah hal yang harus disiapkan sejak awal.

Pendataan

Tahap berikutnya dari pembangunan sistem informasi desa adalah pendataan. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap pemetaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan data dasar. Pada tahap ini, dilakukan pemilihan dan pemilihan data berdasar kategori yang telah disepakati. Perangkat desa yang bertugas bagian ini harus memahami kebutuhan dan ketersediaan data.

Pada proses ini, sebuah tim yang bertugas untuk mencari data dibentuk. Tim ini bertugas untuk mengumpulkan data masih berada di masyarakat. Data yang ada di masyarakat dapat berupa data yang sudah terdokumentasi, misalnya berupa berkas kependudukan (kartu keluarga, akte kelahiran dan lain-lain). Namun dapat juga berupa data yang belum terdokumentasi, misalnya data mengenai perilaku media. Data yang belum terdokumentasi dapat diperoleh dengan cara melakukan survey atau wawancara.

Untuk memudahkan survey atau wawancara, petugas dibekali angket atau selembor isian berisi pertanyaan yang harus dijawab oleh masyarakat. Sistem informasi desa diawali dengan membangun basis data penduduk. Data ini kemudian bisa dilengkapi dengan basis data aset dan sumber daya dalam pengembangannya. Membangun sistem informasi desa bersama pemerintah desa untuk membangun gerakan 1 desa, 1 program, 1 anggaran.

Install sistem informasi desa di komputer desa

Tahap instalasi atau pemasangan aplikasi, adalah tahap dimana aplikasi sistem informasi desa dipasang di komputer milik desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Entry data ke sistem informasi desa

Tahap berikutnya dalam pembangunan sistem informasi desa adalah *entry* data. Sebagaimana telah diuraikan di awal, data yang telah diuraikan di awal, data yang telah dikumpulkan kemudian dimasukkan kedalam mesin pangkalan data sistem informasi desa. Tahap ini disebut sebagai tahap *entry* data. Pada tahap ini, tim atau petugas yang telah ditunjuk bertanggung jawab untuk memasukkan data dengan baik dan benar, sehingga keakuratan data dapat dipertanggungjawabkan. Dalam tahap ini, penting untuk selalu melakukan pemeriksaan data, terutama jika terdapat angket atau lembar isian atau berkas yang belum jelas kebenaran datanya.

h. Pemanfaatan sistem informasi desa

Gunakan data untuk dukung pelayanan administrasi publik di kantor desa, guna data sebagai dasar perencanaan program desa, *update* data setiap hari setiap ada perubahan dan sebagainya. Tahap berikutnya adalah tahap pemanfaatan. Sistem informasi desa yang sudah dilengkapi dengan pangkalan data telah terpasang dengan baik, sudah siap digunakan. Sistem informasi desa dapat digunakan untuk mencetak berkas. Diskusikan rencana pengembangan sistem informasi desa sesuai kebutuhan desa

Sistem informasi desa untuk pengurangan risiko bencana, sistem informasi desa untuk kesehatan, sistem informasi desa untuk pendidikan, untuk pertanian, untuk ekonomi rakyat dan sebagainya.

Sebarluaskan informasi desa melalui beragam media untuk warga desa.

Gunakan media yang ada di desa yang mudah diakses warga. Kita bisa gunakan pertemuan warga, radio siaran komunikasi, SMS, bultin atau Koran desa, sehingga webside untuk menyebarluaskan informasi desa.⁵²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵² Akhmad Nasir, *Op.Cit*, h. 28-36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem informasi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti belum terlaksana dengan baik, berdasarkan Undang-Undang tentang Desa yang terdapat pada Pasal 86 menyebutkan bahwa sistem informasi desa itu meliputi data desa, data pembangunan desa dan kawasan perdesaan serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, sedangkan sistem informasi yang ada di desa Banglas Barat barulah Prodeskel (Profil desa dan kelurahan), Siskudes (Sistem keuangan desa) dan Sispades (sistem informasi pengolahan aset desa), yang mana untuk informasi pembangunan desa dan kawasan perdesaan belum ada diterapkan lagi.
2. Faktor yang mempengaruhi dalam penerapan sistem informasi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dipengaruhi oleh beberapa faktor:
 - a. Faktor sumber daya manusia yang belum memadai atau minim sekali, di dalam penerapan sistem informasi desa perlu adanya sumber daya manusia sebagai operator untuk mengelolanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Faktor kurangnya regulasi penunjang, regulasi penunjang yang lebih rinci lagi di bawah undang-undang sangat diperlukan sekali untuk lebih efektifnya dalam menjalankan penerapan undang-undang terkhusus penerapan sistem informasi desa, regulasi penunjang ini termasuk peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri desa, peraturan menteri keuangan sebagai anggaran, peraturan daerah baik gubernur maupun bupati yang dengan adanya regulasi penunjang ini akan lebih tersistematis dan terperinci dalam penerapan sistem informasi desa ini.
- c. Faktor terbatasnya penyelenggaraan anggaran dana dalam pelaksanaan sistem informasi desa ini sungguh besar karena untuk memperoleh sistem informasi desa ini pemerintah pasti membutuhkan pihak ketiga dalam pembuatan sistem informasi dan juga keberlanjutan sistem informasi desa itu yang harus terus di operasikan.
- d. Faktor kurangnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem informasi di desa. Banyak masyarakat di desa Banglas Barat yang berprofesi sebagai petani, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap sistem informasi sangatlah kurang dikarenakan tidak adanya hubungan dengan pekerjaan masyarakat.



B. Saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk bisa diterapkan sistem informasi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti setelah penulis melakukan penelitian maka penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu:

1. Perlunya kesadaran pemerintah untuk lebih optimal lagi dalam menjalankan undang-undang dengan membuat peraturan-peraturan sebagai penunjang undang-undang seperti peraturan gubernur dan peraturan bupati yang dengan peraturan tersebut sebagai memperkuat pelaksanaan penerapan sistem informasi desa.
2. Untuk dinas-dinas yang terkait dalam penerapan sistem informasi desa agar lebih mengoptimalkan lagi memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada perangkat-perangkat desa yang sebagai pengelola dan pengoperasian penerapan sistem informasi desa. Pelatihan yang berkelanjutan akan meningkatkan sumber daya manusia didalam pengelolaan data-data serta informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat serta pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- A.Hamid.S Attamimi “*Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara – Suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita I – Pelita IV* (Disertasi Dokter UI Jakarta, 1990).
- Ahkmad Nasir,dkk, *Panduan Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) dan Monitoring Partisipatif*, (Yogyakarta: Merapi Recovery Response, 2013).
- Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Bandung : Fakultas Hukum Unpad, 2000).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta;Raja Grafindo,2011.
- Ellydar Chaidir, dkk, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2010).
- HB Satopo, *Metode Penelusuran Kualitatif*, UN Press Surakarta 1999.
- H.A. Tabrani Rusyan, *Membangun Desa Berprestati*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Hestu Cipto Handoyo, *Otonomi Daerah dan Titik Berat Urusan Rumah Tangga Daerah*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1998).
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, yang dikutip kembali oleh A. Rahmad Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, (Jakrata: Gramedia Pustaka Utama, 2008).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cetakan ke-2, 2015.

Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kaji, Teori, Konsep dan Pengembangannya*, Jakarta: Rajawali Pres, 2017.

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: Reflika Aditama, 2011).

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: Rakawali Pres, 2015.

Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009).

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014).

Sri Somantri, *Otonomi Daerah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:sinar Grafika,2011.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

C. Website

<https://github.com/OpenSID/opensid/wiki/Peran-dan-Manfaat-Sistem-Informasi-Desa>.

<https://www.panda.id/sistem-informasi-desa>.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



D. Jurnal

Halicipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apriyansyah dkk, *Efektivitas Sistem Informasi Desa(SID) Dalam Pelayanan Publik di Desa Delingo, Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul*, JAKPP, Vol 4 No.1 Juni 2018.

Jurnal Analisis, Desember 2017, Vol. 6 No. 2.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PENGISIAN ANGKET

A. Kata Pengantar

Pertanyaan yang diajukan dalam angket ini bertujuan untuk memperoleh data tentang Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti”.

B. Petunjuk Pengisian Angket

1. Berilah tanda (x) pada jawaban yang Bapak/Ibuk/Saudara/i pilih.
2. Angket ini semata-mata digunakan untuk tujuan penelitian.
3. Kejujuran Bapak/Ibuk/Saudara/I sangat diperlukan dalam pengisian angket ini.

C. Identitas Mahasiswa

Nama : Al Mario
Nim : 11627103820
Fak/Jur : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum

D. Identitas Responden

Nama * :
Alamat :
Umur :

E. Pertanyaan

1. Apakah bapak/ibuk/saudara/i mengetahui tentang program sistem informasi desa didesa Banglas Barat?
 - a. Tahu
 - b. Tidak tahu

Boleh nama samaran/inisial

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s

Har Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif

UIN SUSKA RIAU



2. Apakah pemerintahan desa berserta dinas terkait pernah mensosialisasikan tentang sistem informasi desa?

- a. Pernah
- b. Tidak pernah

3. Apakah bapak/ibuk/saudara/i pernah menanyakan tentang sistem informasi desa kepada perangkat desa ?

- a. Pernah
- b. Tidak pernah

4. Apakah ada kebutuhan ibu/bapak/saudara/i dengan adanya sistem informasi desa di desa Banglas Barat?

- a. Ada
- b. Tidak ada

5. Apakah sumber daya manusia (SDM) menjadi penghambat dalam penerapan program sistem informasi desa di desa Banglas Barat?

- a. Benar
- b. Tidak benar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Pertanyaan untuk Kepala dinas komunikasi dan informasi:

1. Apakah bapak mengetahui tentang sistem informasi desa sebagaimana yang terdapat pada pasal 86 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa?
 2. Apakah dinas kominfo sudah menyediakan informasi untuk perencanaa pembangunan desa dan kawasan perdesaan?
 3. Apakah kepala desa / aparat desa pernah menyanyakan tentang informasi perencanaan pembangunan desa kepada bapak?
 4. Bagaimana mekanisme/ teknis dalam pelaksanaan SID di desa..?
 5. Apa faktor yang menghambat dalam penerapan sistem informasi desa?
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pertanyaan untuk kepala desa:

1. Apakah bapak mengetahui tentang program sistem informasi desa sebagaimana yang terdapat pada pasal 86 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa?
 2. Apakah pemerintah (dinas komunikasi dan informasi) sudah memberikan akses Sistem Informasi Desa di desa Banglas Barat?
 3. Apakah bapak pernah menyanyakan tentang penerapan sistem informasi desa kepada pemerintahan kabupaten?
 4. Apa tugas dan kewenangan bapak dalam menerapkan sistem informasi desa kepada masyarakat?
 5. Apa tindak lanjut yang bapak lakukan terkait pemberian SID oleh pemerintah?
 6. Sejak kapan bapak mulai mensosialisasikan sid?
 7. Apakah masyarakat sudah dapat mengakses sistem informasi desa?
 8. Apa tanggapan masyarakat tentang penerapan sistem informasi desa?
 9. Apa masyarakat pernah memberikan masukan akan pentingnya informasi desa?
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© HAKIKI MILIK JIN Suska Rian

Telah dimunaqasahkan pada :

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.



702

Pr. Sub

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Akademik Mahasiswa
Fakultas Syariah dan
UIN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Penelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **AL MARIO**
 NIM : **11627103820**
 Program Studi : **ILMU HUKUM**
 Judul : ***Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti***
 Pembimbing : **Ilham Akbar SHI, SH, MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 17 Maret 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alif Svahrin, SH., MH., CPL
 NIK. 198804302019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan memasukkannya ke dalam karya tulis lain tanpa mengutip sumbernya.
 2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Al Mario
NIM	: 11627103820
Tempat/Tanggal Lahir	: Rintis, 05 September 1995
Program Studi	: ILMU HUKUM
Fakultas	: SYARIAH DAN HUKUM
Universitas	: UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SISTEM INFORMASI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA BANGLAS BARAT KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI”** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 Maret 2020
Yang membuat pernyataan



AL MARIO
NIM. 11627103820

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/10099/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AL MARIO
NIM : 11627103820
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : **21 NOVEMBER 2019**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 26 Desember 2019

Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 195807121986031005

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul "PENERAPAN SISTEM INFORMASI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA BANGLAS KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI", ditulis oleh saudara:

: AL MARIO

: 11627103820

: Ilmu Hukum

: Kamis / 03 Oktober 2019

: Musrifah, SH., MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Oktober 2019

Narasumber

Musrifah, SH., MH

NIP. 130 217 039

Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Erni, S.Sos., MM

NIP. 19680226 199103 2 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang Mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Dilarang Mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini untuk tujuan lain tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Dilarang Mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini untuk tujuan lain tanpa izin UIN Suska Riau.
5. Dilarang Mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini untuk tujuan lain tanpa izin UIN Suska Riau.
6. Dilarang Mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini untuk tujuan lain tanpa izin UIN Suska Riau.
7. Dilarang Mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini untuk tujuan lain tanpa izin UIN Suska Riau.
8. Dilarang Mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini untuk tujuan lain tanpa izin UIN Suska Riau.
9. Dilarang Mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini untuk tujuan lain tanpa izin UIN Suska Riau.
10. Dilarang Mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini untuk tujuan lain tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau

Shafa Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/27446
T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F/PP.00.9/8959/2019 Tanggal 4 November 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **AL MARIO**
2. NIM / KTP : **11627103820**
3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **KEPULAUAN MERANTI**
6. Judul Penelitian : **PENERAPAN SISTEM INFORMASI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA BANGLAS BARAT KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**
7. Lokasi Penelitian : **DESA BANGLAS BARAT KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 4 November 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kepulauan Meranti
3. Kepala DPMPTSP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Johari Dagang Komplek Perkantoran Bupati, Telp/ Fax. (0763) 33630

E-Mail : dpmptsptkmeranti@gmail.com

SELATPANJANG

Kode Pos 28753

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 053/DPMPTSPTK/II/2020/SKP/11

TENTANG :

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, setelah membaca surat dari : **Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/27446 Tanggal 04 November 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi penelitian kepada :

Nama : **Almario**
NIM : **11627103820**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Jenjang Pendidikan : **S1**
Lokasi Penelitian : **Kabupaten Kepulauan Meranti**
Judul Penelitian : **Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti**
Lokasi Penelitian : **Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini dibuat.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait, agar dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini, terima kasih.

Dibuat di : Selatpanjang
Pada tanggal : 07 Januari 2020

**An. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
SEKRETARIS**

dr. H. MISRI HASANTO, M.Kes
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690201 200212 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Terpadu No. Telp. (0763) - 434712 Fax.(0763) – 434712

SELATPANJANG

Kode Pos 28753

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.1/DPMD/I/2020/11

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

: Drs. IKHWANI, M.IP

: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Kepulauan Meranti

Dengan ini menerangkan bahwa :

: Al Mario

: 11627103820

: Ilmu Hukum

: **Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan
Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di
Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten
Kepulauan Meranti.**

Adalah benar bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti berupa
wawancara pada tanggal 07 Januari 2020 untuk memperoleh data guna
Penyusunan Skripsi dengan Judul "**Penerapan Sistem Informasi Desa
Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Banglas
Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
maksudnya.

Selatpanjang, 07 Januari 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,



Drs. IKHWANI, M.IP

PEMBINA UTAMA MUDA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya turunan tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KECAMATAN TEBING TINGGI

KANTOR KEPALA DESA BANGLAS BARAT

Jalan Mahmud Ujung No.74 Banglas Barat (0763)Kode Pos 28753

SURAT KETERANGAN

Nomor : 460 / 020009-KTU/01

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ASNAWI NAZAR,S.PI**
Jabatan : KEPALA DESA
Alamat : DESA BANGLAS BARAT

Menerangkan bahwa :

Nama : **AL MARIO**
NIM : 11627103820
Program Studi : ILMU HUKUM
Jenjang : S1

Telah melakukan penelitian di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai bahan untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi) di UIN Suska Riau dengan judul **Penerapan Sistem Informasi Desa berdasarkan Undang-undang No 6**

Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banglas Barat, 08 Januari 2020

KEPALA DESA BANGLAS BARAT

KEC.TEBING TINGGI



ASNAWI NAZAR,S.PI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



Al-Mario, dilahirkan di Selatpanjang pada tanggal 05 September 1995. Anak ke Sembilan dari sepuluh bersaudara ini merupakan putra dari pasangan Agustar dan Raizah, saat ini penulis tinggal di jalan Buluh Cina jalur masuk kampus UIN SUSKA Riau di toko Fajjar Meranti Fotocopy dan Printing. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 18 Tebing Tinggi tamat pada tahun 2008, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Tebing Tinggi tamat pada tahun 2011 dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Selatpanjang kabupaten Kepulauan Meranti yang tamat pada tahun 2014.

Pada tahun 2016 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasi Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada tahun 2019 Penulis melakukan magang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru setelah itu melanjutkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Parit I/II kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Pada tanggal 09 Maret 2020 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi “Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti” dengan prediket Cumlaude.